

PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL SEBAGAI LANGKAH PENANGGULANGAN KEMISKINAN DIMASA PANDEMI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Fachrizal-Aliffan Rizky

NPP: 29.0596

*Asdaf Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta
Program Studi Manajemen Keamanan dan
Keselamatan Publik*

Email: izariffan@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): Disaster is an event that is very unexpected for every living creature in the world, because it is very detrimental to both material and soul. The COVID-19 disaster killed many sectors including the education, social sector, and the economic sector was the most affected. This has an impact on increase in poverty rates and Termination of Employment (PHK). In the event of a disaster, the first thing that must be considered is the fulfillment of basic needs for disaster victims. The government has a Social Service to help ease the burden on the people who are building or even better if it can prevent the poverty rate from increasing. The government's responsibility to the community is implemented in the form of social assistance provided to the affected community. This is where the role of the DKI Jakarta Provincial Social Service is needed, in utilizing the Social Service to work by always paying attention to the vision and mission. **The purpose** of this research was to find out the role of the Social Service in social assistance to the community in this pandemic era. The **method** used by the researcher is descriptive qualitative with interviews, observations, and documents as data collection, as well as data analysis techniques using data reduction, data display (data display), and drawing conclusions (conclusion). **The results** of this study explain the role of the DKI Jakarta Provincial Social Service in distributing social assistance, especially Cash Social Assistance (BST) to disaster victims, in this case the people who hinder the covid-19 disaster. **Conclusion:** several things that hinder the Social Service in carrying out its role were found. These are the response of recipients who are less responsive, duplication of data with assistance from the Ministry of Social Affairs, the presence of inappropriate recipients of assistance, distribution locations that are too far from the address, power of attorney constraints, and also limited distribution infrastructure. However, to overcome these obstacles, various efforts have been made for solutions. And efforts are needed to improve each activity, so that the benefits of cash social assistance can be enjoyed by the community. Keywords: Social Assistance, Social Service, Distribu

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Bencana merupakan peristiwa yang sangat tidak diinginkan kedatangannya bagi setiap makhluk hidup yang ada di seluruh dunia, karena sangat merugikan baik itu unsur materi maupun jiwa. Bencana covid-19 mematikan banyak sektor diantara lain sektor pendidikan, sosial, dan yang paling terkena imbasnya adalah sektor ekonomi. Hal ini ber impact pada kenaikan angka kemiskinan dan Pemutusan Hubungan Pekerjaan (PHK). Apabila terjadi bencana,

yang pertama kali harus diperhatikan adalah pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana. Pemerintah memiliki Dinas Sosial untuk membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak atau lebih bagus lagi apabila dapat menahan angka kemiskinan agar tidak bertambah. Tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat diimplementasikan dalam bentuk bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak bencana tersebut. Disinilah peran Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dibutuhkan, dalam menjalankan perannya Dinas Sosial berkerja dengan selalu memperhatikan visi dan misi. **Tujuan penelitian** ini dilakukan adalah untuk mengetahui peran Dinas Sosial dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat di era pandemi ini. **Metode** yang digunakan peneliti adalah deskriptif, kualitatif dengan wawancara, observasi, dan dokumen-dokumen sebagai teknik pengumpulan data, juga teknik analisis data menggunakan reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan (conclusion). **Hasil penelitian** ini menjelaskan Peran Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dalam menyalurkan bantuan sosial khususnya Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada korban bencana dalam hal ini masyarakat yang terdampak bencana covid-19. **Kesimpulan** : ditemukan beberapa hal yang menjadi hambatan Dinas Sosial dalam menjalankan peran nya. Hal tersebut adalah respon penerima bantuan yang kurang responsive, adanya duplikasi data dengan bantuan dari kemensos, adanya penerima bantuan yang tidak sesuai, lokasi pendistribusian yang teralalu jauh dari alamat, kendala surat kuasa, dan juga sarana prasarana pendistribusian yang terbatas. Namun untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut telah diatasi oleh berbagai upaya-upaya yang dilakukan untuk menjadi jalan keluar. Serta perlu diadakan upaya peningkatan disetiap kegiatan, agar manfaat bantuan sosial tunai tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Kata Kunci : Bantuan Sosial, Dinas Sosial, Penyaluran

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seperti yang kita ketahui bersama virus ini diketahui keberadaannya pada bulan Desember 2019 di Wuhan, China. Indonesia yang merupakan salah satu negara dengan populasi terbanyak ke empat setelah Amerika Serikat dengan populasi lebih dari 271.349.889 orang (January 2021) perlu mewaspadaai penyebaran virus ini, karena dengan populasi manusia sebanyak itu virus akan menyebar dengan cepat ditambah lagi orang Indonesia suka sekali berkumpul maka interaksi antara orang yang telah terjangkit dengan yang belum tidak dapat terhindar lagi. Indonesia mengumumkan kasus covid-19 nya untuk pertama kali ditemukan di Depok pada hari Senin, 2 Maret 2020 . Hal ini diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta. Menurut Presiden Joko Widodo di dalam pengumumannya tersebut menyampaikan bahwa kedua warga Depok tersebut merupakan seorang wanita berumur 64 tahun dan anak perempuannya yang berumur 31 tahun. Kedua orang tersebut diduga terpapar virus corona karena sebelumnya terjadi kontak dengan warga negara asal Jepang yang datang ke Indonesia. Warga negara asal Jepang tersebut baru diketahui terinfeksi covid-19 setelah tiba di Malaysia. Pada saat itu juga keseimbangan dan tata kehidupan yang berjalan di seluruh negara terganggu. Virus ini mengganggu sektor-sektor vital seperti ekonomi, sosial, dan budaya. Oleh sebab itu, hal ini jelas berdampak kepada kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi angka positif yang terjangkit wabah covid-19 di sebuah negara maka masyarakat sulit untuk melakukan kegiatan yang biasa mereka lakukan setiap harinya. Hal ini menghambat roda perekonomian sebuah negara disebabkan oleh pemerintah yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar mulai tanggal 17 April 2020, guna menekan angka penyebaran virus tersebut. Segala hal yang berkaitan dengan interaksi antara manusia semua dibatasi,

dampaknya bukan hanya ekonomi sektor perdagangan yang mengalami angka penurunan. Namun masih banyak pekerja yang bekerja di suatu perusahaan di sektor formal dirumahkan. Hal ini disebabkan karna terhambatnya aktivitas perekonomian yang disebabkan oleh pembatasan interaksi secara otomatis menjadikan pelaku usaha melakukan efisiensi guna menekan angka kerugian. Oleh sebab itu, pekerja dengan jumlah yang tidak sedikit terpaksa dirumahkan atau lebih parahnya lagi bahkan diberhentikan (PHK). Sebagai upaya pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat berdasarkan Undang-Undang No 11 tahun 2009 Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial bahwa hal tersebut diimplementasikan dalam bentuk penyaluran bantuan sosial kepada warganya yang menjadi korban covid-19. Namun mekanisme penyalurannya diatur oleh Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagaimana yang ada didalam Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 1 ayat (1) menerangkan bahwa Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri, dan Pasal 1 ayat (2) Bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan penyaluran bantuan sosial di Kota Jakarta Selatan. Berdasarkan informasi yang penulis dapat dari data Dinas Sosial di Kota Jakarta Selatan. Dampak yang ditimbulkan oleh covid-19 berimbas pada peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan di Kota Jakarta Selatan. Penyaluran bantuan sosial oleh Dinas Sosial sangat diperhatikan hal itu lah yang membuat peneliti tentunya menimbulkan berbagai macam rumusan masalah. Diantaranya bagaimana peran Dinas Sosial dalam penyaluran bantuan sosial sebagai langkah penanggulangan kemiskinan dimasa pandemi Kota Jakarta Selatan, Apa saja yang menjadi faktor penghambat Dinas Sosial dalam penyaluran bantuan sosial di masa pandemic, Bagaimana upaya yang dilakukan Dinas Sosial dalam mengatasi faktor penghambat yang dialami Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dalam proses penyaluran bantuan sosial tersebut.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, yang berkaitan dengan peran Dinas Sosial dalam Penyaluran sebagai Langkah Penanggulangan Kemiskinan di masa pandemi. Penelitian tersebut antara lain: judul penelitian Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Fakir Miskin di Kota Makassar oleh Ariska Suriyanti, mahasiswa Sarjana Ilmu Administrasi Universitas Muhammadiyah Makassar (2021). Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Fakir Miskin Di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Penelitian oleh Muhammad Lukmanul Hakim, Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda (2018) yang berjudul Peran Dinas Sosial Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Terhadap Korban Bencana Kebakaran di Kota Samarinda Tahun 2018. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk lebih mengaktifkan kegiatan pendataan korban bencana dilapangan, agar diperoleh data yang akurat untuk digunakan dalam mengambil langkah-langkah pemberian bantuan sosial tanggap darurat dan mengkoordinasikan dengan instansi terkait dalam penanggulangan bencana.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni Peran Dinas Sosial dalam Penyaluran Bantuan Sosial sebagai Langkah Penanggulangan Kemiskinan di Masa Pandemi Kota Administrasi Jakarta Selatan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada lokasi penelitian yang dilakukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, selain itu kondisi penyaluran bantuan sosial yang hanya dilakukan saat pandemic covid-19 berlangsung, sementara yang lain membahas tentang penyaluran bantuan sosial yang biasa diberikan kepada masyarakat miskin.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Peran Dinas Sosial dalam penyaluran bantuan sosial sebagai langkah penanggulangan kemiskinan di masa pandemi Kota Jakarta Selatan, untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penghambat dalam penyaluran bantuan sosial sebagai langkah penanggulangan kemiskinan di masa pandemi Kota Jakarta Selatan, untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Dinas Sosial dalam mengatasi faktor penghambat dalam penyaluran Bantuan Sosial Tunai di masa pandemi Kota Jakarta Selatan.

II. METODE

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode deskriptif. Konsep dasar kualitatif ini lebih menekankan bahwa unsur terpentingnya adalah sifat yang dimiliki oleh data yang diperoleh yaitu data ilmiah yang disajikan dalam bentuk penjelasan dan uraian dengan bentuk informasi atas penelitian tersebut. Menurut Moleong (2010:6) metode kualitatif merupakan “penelitian yang bertujuan untuk mengerti fenomena mengenai pengalaman yang dialami oleh subjek penelitian misalnya persepsi, perilaku, motivasi, perbuatan yang lain-lain, secara holistic, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan macam-macam metode ilmiah”. Peneliti merupakan media utama, teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan triangulasi (gabungan), analisis data yang bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kemudian difokuskan pada makna yang bersifat umum. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, peneliti melakukan wawancara secara mendalam terhadap lima orang informan yang berdinis di kantor Dinas Sosial.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menganalisis peran Badan Dinas Sosial dalam penyaluran bantuan sosial sebagai Langkah penanggulangan Kemiskinan di Masa Pandemi Kota Administrasi Jakarta Selatan. Analisa oleh peneliti melahirkan beberapa subbab berikut :

3.1 Peran Dinas Sosial Dalam Penyaluran Bantuan Sosial

Dinas Sosial merupakan pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Gubernur/Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Daerah dan tugas yang diberikan dibidang sosial tingkat Daerah, artinya segala hal yang menyangkut tentang sosial, kemanusiaan termasuk kesejahteraan adalah ranah Dinas Sosial. Sebagai Lembaga yang memiliki tugas mulia bagi negara, Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta harus berkompeten menjalankan tugas dengan rasa penuh kejujuran dan keikhlasan dengan tujuan berhasil mensejahterakan khususnya bagi masyarakat DKI Jakarta.

Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan memiliki beberapa misi yang perlu diwujudkan dalam prosesnya membangun kota Jakarta, Salah satunya adalah “Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan sarana dan prasarana, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang”. Dinas

Sosial mengartikan misi dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta tersebut ke dalam sejumlah program yang memiliki cita-cita meningkatkan keadilan sosial dengan mentaskan kemiskinan, membangun kemandirian masyarakat prasejahtera, serta mendorong kesejahteraan dan keadilan bagi penyandang disabilitas dan lansia yang berasal dari keluarga prasejahtera. Hal ini lah yang mendorong Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta untuk mewujudkan misi Gubernur Provinsi DKI Jakarta menjadi sebuah realisasi yang nyata.

Dinas Sosial sebagai fasilitator beragam bantuan, baik bantuan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam melaksanakan perannya, Dinas Sosial menjaga integritas untuk terus berupaya berlaku netral, adil dan optimal, mulai dari pendataan, verifikasi dan validasi hingga penyaluran. Data penerima bantuan dimutakhirkan secara berkala, dengan tujuan pemerataan kesejahteraan, sehingga arah bantuan menjadi tepat sasaran. Dalam menjalankan perannya dinas sosial melakukan berbagai upaya agar bantuan sosial dapat tepat sasaran sehingga kesejahteraan masyarakat tetap terjaga.

3.2 Proses Pendataan dan Penyaluran Bantuan Sosial kepada Calon Penerima Bantuan

Pendataan merupakan suatu proses pendataan keterangan yang benar dan nyata tentang sesuatu, baik manusia, benda, lingkungan, maupun kejadian tertentu. Pencatatan calon penerima bantuan dimaksudkan sebagai suatu dokumentasi atau arsip yang dapat digunakan sebagai acuan data masyarakat yang akan di berikan bantuan sosial tunai (BST).

Ada beberapa jenis bantuan yang akan diberikan pemerintah kepada masyarakat yang kehilangan mata pencaharian karena pandemi virus corona antara lain sembako, Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Untuk Bantuan Sosial Tunai (BST) sendiri adalah bantuan yang bersumber dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang akan diberikan kepada masyarakat yang terdata didalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sedangkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah bantuan yang berasal dari alokasi dana daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang akan diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada masyarakat yang kehilangan mata pencaharian karena pandemi.

Pemerintah menetapkan sejumlah syarat bagi masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan sosial tunai tersebut. Diantaranya sebagai berikut”

1. Calon penerima adalah masyarakat yang masuk dalam pendataan RT/RW daerah setempat di Provinsi DKI Jakarta.
2. Calon penerima adalah mereka yang terdampak pandemi covid dan tidak memiliki penghasilan yang tetap.
3. Calon penerima tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) lain dari pemerintah pusat atau Kemensos. Hal ini berarti calon penerima bantuan tidak menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Paket Sembako, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hingga Kartu Prakerja.
4. Jika calon penerima tidak mendapatkan bansos dari program lain, tetapi belum terdaftar oleh RT/RW, maka bisa langsung menginformasikannya ke RT/RW setempat yang datanya akan diteruskan ke kelurahan
5. Jika calon penerima memenuhi syarat, tetapi tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Penduduk (KTP), tetap bisa mendapat bantuan tanpa harus membuat KTP lebih dulu. Tapi, penerima harus berdomisili di daerah tersebut dan menulis alamat lengkapnya.
6. Jika penerima sudah terdaftar dan valid maka BLT akan diberikan melalui transfer ke rekening bank DKI penerima yang sudah diberikan dari Dinas Sosial kepada masyarakat. Kemudian masyarakat bisa langsung mengambil uang tersebut di ATM yang memiliki label Bank DKI terdekat dengan domisili.

3.3 Faktor Penghambat Dinas Sosial Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Tunai di Kota Jakarta Selatan

Berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa pihak terkait permasalahan-permasalahan apa saja yang Dinas Sosial dapatkan saat menjalankan tugas menyalurkan Bantuan Sosial Tunai mulai dari pendataan hingga penyerahan bantuan sosial tersebut, peneliti mengumpulkan beberapa faktor yang menjadi kendala bagi Dinas Sosial dalam menyalurkan bantuan sosial di Provinsi DKI Jakarta khususnya Kota administrasi Jakarta Selatan.

1. Respon Penerima Bantuan yang Kurang Responsif

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penelitian di tempat, dapat diketahui bahwa masyarakat masih belum tanggap dan responsif terhadap Pemerintah. Terbukti saat dilaksanakan undangan pertama yang diumumkan oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta kepada penerima, Penerima BST tersebut tidak hadir dalam undangan pertama. Hal ini menyulitkan Pihak Dinas karena harus mengkonfirmasi Kembali kepada yang bersangkutan, untuk meminta keterangan dan kejelasan kepada yang bersangkutan.

Hal ini juga yang saya temui dari hasil wawancara saya bersama Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Ibu Premi Lasari. Beliau berkata:

“Hal yang menghambat proses penyaluran bantuan sosial tunai ini kadang datang dari masyarakat itu sendiri, contohnya disaat kami sudah menyebar undangan pertama untuk penerima manfaat tersebut, penerima BST tersebut tidak ada atau tidak menghadiri undangan tersebut. Ini dapat menghambat kami untuk meneruskan kelangkah selanjutnya”. Dinas Sosial tidak bisa langsung menghapus data penerima manfaat BST tersebut setelah yang bersangkutan tidak menghadiri undangan pertama yang diberikan, namun pihak Dinas Sosial akan memberikan undangan yang ke dua sebagai kesempatan atau toleransi dari ketidakhadiran Penerima manfaat di undangan pertama.

2. Adanya Duplikasi Data dengan Bantuan Sosial dari Kemensos

Peneliti mendapatkan informasi bahwa beberapa penerima Bantuan Sosial Tunai tersebut terkadang telah terdata Namanya menjadi penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Keluarga Harapan (PKH). Yang dalam hal ini Program tersebut adalah program yang diselenggarakan oleh Kemensos.

Apabila terdapat data yang terdaftar didalam data penerima bantuan Kemensos dan Dinas Sosial dalam satu waktu, maka hal ini dianggap tidak valid karena yang bersangkutan sudah menerima bantuan Kemensos. Ini menyebabkan bantuan sosial tidak tepat sasaran.

Oleh sebab itu penerima bantuan sosial yang terdaftar di Dinas Sosial harus dalam status tidak masuk daftar nama penerima bantuan di Lembaga lain termasuk Kemensos.

3. Adanya Penerima Manfaat yang Pindah/tidak ditemukan

Kendala berikutnya adalah bahwa alamat penerima yang telat terdaftar Namanya tersebut sudah pindah atau tidak ditemukan atau bahkan sudah meninggal dunia. Data Penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) memiliki sedikit kerancuan terkait adanya warga yang sudah meninggal dunia dan pindah rumah namun masih tercantum sebagai penerima bantuan di masa pandemi corona ini. Namun Dinas Sosial beranggapan bahwa jika terjadi hal yang seperti ini bantuan tersebut tidak boleh digantikan atau dipending distribusinya. Jadi bagi yang sudah meninggal diterima oleh ahli waris yang masih masuk dalam Kartu Keluarga (KK) karena data ini sifatnya data keluarga bukan data individu.

4. Lokasi Pendistribusian yang Terlalu Jauh dari Alamat

Sebanyak 19% aduan masyarakat yang dipantau mengatakan bahwa lokasi pendistribusian terlalu jauh dari rumah tinggalnya. Hal ini jelas menjadi sebuah masalah yang harus diselesaikan oleh Dinas terkait dalam hal ini Dinas Sosial. Mengapa akomodasi menjadi hal yang penting,

karena lokasi pendistribusian yang terlalu jauh pun akan menjadi faktor penghambat didalam proses penyaluran bantuan sosial.

Dinas Sosial perlu mencari jalan keluar bersama Bank DKI untuk menyesuaikan lokasi domisili agar lokasi pendistribusian tidak jauh sehingga lokasi dapat terjangkau.

5. Kendala Surat Kuasa Yang Tidak Ditandatangani Kepala Keluarga

Biasanya permasalahan ini muncul apabila surat kuasa tersebut tidak ditandatangani suami karena kondisi tertentu misalnya berlayar, kerja luar daerah/negeri, cerai, dipenjara, dirawat di rumah sakit karena covid, dan sebagainya.

Permasalahan ini dapat diselesaikan apabila istri membawa dokumen pendukung seperti buku sebagai pernyataan bahwa yang bersangkutan adalah seorang istri dari kepala keluarga yang sedang berada jauh untuk mewakili pengambilan atau pemenuhan undangan dari pihak Kelurahan ataupun Dinas terkait.

6. Karena Percepatan Terbatasnya Sarana dan Prasarana dalam Pendistribusian

Sarana dan prasarana dalam mendistribusikan bantuan merupakan sebuah faktor penghambat keberhasilan penyaluran bantuan sosial. Karena sarana dan prasarana adalah aspek yang utama dalam menjamin bantuan tersebut sampai pada orang yang tepat.

3.4 Upaya-Upaya Yang Dilakukan Dinas Sosial

3.4.1 Upaya Adaptasi yang Adaptif

Dalam menyelesaikan sebuah tugas, individu/kelompok dituntut untuk dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Definisi dari adaptasi sendiri dapat diartikan sebagai kemampuan suatu individu atau organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dinas Sosial terus berupaya mengamati tingkah laku dan kebiasaan masyarakat didalam kesehariannya, dan mencoba mengamati apa yang menjadi kekurangan bagi masyarakat Provinsi DKI Jakarta.

Dinas Sosial melakukan berbagai upaya untuk menjamin kesejahteraan masyarakatnya. Begitupun untuk menjadi Lembaga yang konsisten berhasil adaptif kepada lingkungan disekitarnya serta mengerti apa yang dibutuhkan masyarakat. Hal ini tidak lepas dari dua upaya. Yaitu upaya Penyelenggaraan dan Peningkatan Kualitas SDM.

A. Upaya Penyelenggaraan yang benar dan tepat

Dalam melakukan penyelenggaraan program Dana Bantuan Sosial, Dinas Sosial menjalankan tugas tentunya berdasarkan sesuai Standar Operasional Prosedur yang jelas dan memiliki tujuan dan sasaran yang akan di capai. Begitupun yang tertera didalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 dan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019.

Seperti apa yang peneliti sampaikan sebelum-sebelumnya bahwasannya Dinas Sosial terus berupaya menjalankan tugasnya bukan hanya sesuai SOP yang telah ditentukan tetapi lebih dari itu. Dinas Sosial berupaya konsisten untuk berkerja dengan konsisten, mulai dari pendataan, selanjutnya data yang sudah dirangkum untuk dilakukan verifikasi serta validasi hingga sampai penyaluran bantuan tersebut sampai kepada penerima. Serta data penerima bantuan dimutakhirkan secara berkala, maksudnya adalah data penerima bantuan tersebut selalu di update secara berkala dengan tujuan pemerataan kesejahteraan, sehingga dapat menghindari bantuan sosial yang salah sasaran.

B. Kualitas Sumberdaya Manusia

Kualitas SDM merupakan salah satu komponen yang sangat penting didalam sebuah Lembaga agar segala tugas dan tanggung jawab dapat di selesaikan dengan optimal. SDM merupakan komponen

yang terus di berdayakan oleh Dinas Sosial agar semakin baik lagi kedepannya. Untuk mengukur ke efektifan Sumber Daya Manusia adalah apabila program tersebut terlaksana secara tepat guna dan tepat waktu. Adapun kompetensi dan kinerja pegawai pelaksana Program BST saat peneliti tanyakan hal tersebut dan jawabannya adalah sebagai berikut:

“Kompetensi dari pegawai yang berkaitan dengan pengelolaan data program BST sudah kami jamin dan tentunya terlatih, dalam hal ini pendamping sosial Pusdatin Jamsos sering mengikuti pelatihan pengelolaan data dan memang dalam pekerjaan sehari-

Jawaban ini seiring hari petugas pendamping sosial memang memiliki tugas untuk melakukan pengelolaan data”

dengan jawaban yang diberikan Kepala Bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta penelitian melakukan wawancara di Pusat Data dan Informasi Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta mengenai bersama Ibu Dede selaku orang yang bertanggung jawab mengurus data dan informasi terkait dana Bantuan Sosial Tunai, berkata demikian :

“dalam pelaksanaan pendataan, pegawai yang mengelola data atau tim pengolahan data hanya 4 orang, yaitu Joko Basuki Sarjana Ekonomi, Ridho Hadiarto Sarjana Sosiologi, Akmal Sarja Teknik Informatika dan Dimas Pradipta Lulusan SMA, para petugas pengelola diberikan 3 monitor dan 1 laptop untuk mengerjakan data Bantuan Sosial Tunai”.

Berdasarkan informasi diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam Peran yang di emban Dinas Sosial adalah sebagai fasilitator, yang menyediakan SDM yang mempunyai serta kelengkapan manusia itu untuk menyelesaikan tugasnya. Kenapa dibidang mempunyai karena mereka hanya berempat dan hanya menyelesaikan pendataan tersebut kurang dari satu bulan. Hal ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Daerah untuk mewujudkan misi nya dalam mensejahterakan masyarakat.

3.4.2 Upaya Integrasi

Integrasi adalah pembauran sesuatu hal yang berbeda hingga menjadi kesatuan. Integrasi merupakan konsep-konsep yang banyak diterapkan dalam banyak bidang, mulai dari sosial, politik, budaya, hingga ekonomi. Segala macam bentuk elemen yang berbeda karakter disatukan dan klasifikasinya berbeda konsep, paradigma, dan unit.

Hal inilah yang selalu diupayakan oleh Dinas Sosial agar kesejahteraan masyarakat tetap terjaga, dengan menjalin kerja sama yang baik oleh aparat penyelenggara yang lain akan memudahkan penyaluran bantuan sosial sampai kepada tangan yang tepat.

Keberhasilan sebuah Lembaga tidak lepas dari kerja sama yang telah dibangun dengan Lembaga lainnya, itu sebabnya Dinas Sosial selalu mengupayakan integrasi yang baik didalam tugasnya, adapun turunan dari integrasi sendiri yaitu Koordinasi dan Sosialisasi, sebagai berikut

A. Koordinasi

Koordinasi adalah penyatuan dan sinkronisasi upaya anggota kelompok sehingga memberikan kesatuan tindakan dalam mengejar tujuan bersama. Ada beberapa hal yang saya tanyakan kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Ibu Premi Lasari terkait koordinasi apa saja yang dijalani Dinas Sosial terkait dalam penyaluran bantuan sosial mulai dari pendataan.

“Dalam penyalurannya (Bantuan Sosial Tunai), Dinas Sosial berkerja sama dengan pihak RT, RW dalam masalah pendataan, yang kemudian datanya diberikan kepada Lurah setempat untuk selanjutnya diberikan ke Dinas Sosial yang kemudian data tersebut di verifikasi dan di validasi oleh kami. Selanjutnya apabila sudah dirasa telah berada pada keputusan akhir calon penerima bantuan tersebut akan diserahkan uang senilai Rp.300.000 disalurkan melalui rekening Bank DKI dalam bentuk Kartu Tabungan dan Kartu ATM Bank DKI”. Berdasarkan jawaban dari Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Ibu Pre Lasari diatas bahwasannya Dinas Sosial tetap

membutuhkan fungsi koordinasi yang akan dilakukan kepada aparat penyelenggara diatas seperti RT RW, dan kelurahan.

B. Sosialisasi

Sebuah kegiatan tidak akan berhasil tanpa adanya perencanaan yang baik, dan sebuah program tidak akan berhasil tanpa adanya sosialisasi kepada masyarakat yang baik pula. Oleh sebab itu sebuah program harus disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat, karena apabila tidak ada nya sosialisasi masyarakat tidak akan mengetahui program tersebut.

Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial adalah berupa selebaran undangan kepada sejumlah Kepala Wilayah ataupun link zoom untuk menghadiri rapat secara daring. Sosialisasi ini berkaitan dengan pendistribusian buku tabungan dan kartu ATM Bantuan Sosial Tunai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta undangan kedua data take in tahun 2021.

Dalam melaksanakan sosialisasi Dana Bantuan Sosial Tunai terdapat berbagai cara dimana pada wawancara yang telah selesai dilakukan peneliti dengan Kepala Bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta berkata demikian :

“Sosialisasi aktif dilakukan kepada masyarakat melalui pendamping sosial Pusdatin Jamsos selain itu sosialisasi dilakukan secara berjenjang dan berkoordinasi dengan unsur Walikota, Kecamatan, dan Lurah. Metode lain dalam pelaksanaan sosialisasi yakni melalui media digital, dinas Dinas Sosial melalui media sosial maupun website secara berkala memberikan informasi pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai yang sedang berlangsung..”Dikarenakan pada masa pandemic covid-19 kegiatan sosialisasi sangat terbatas, sehingga sosialisasi tatap muka dilakukan via daring, begitu pun dengan ucapan Ibu Dede :

“Sosialisasi yang kami lakukan yaitu melalui media sosial dan aparat kelurahan, bagaimana kami harus tetap mensosialisasikan program ini dan membatasi jarak kepada masyarakat” Hal ini juga yang menjadi acuan bahwa penegakan protocol kesehatan harus tetap berjalan, karena keramaian saat proses pengambilan bantuan sosial tidak dapat dibantah. Oleh sebab itu protokol kesehatan dengan penyaluran bantuan Sosial masih bersikutan, maka selain mensosialisasikan tentang bantuan sosial jangan lupa untuk mengingatkan kepada masyarakat tentang pentingnya protokol kesehatan. masih kurang dalam proses penanggulangan bencana banjir dalam sarana dan prasarana.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Peran Dinas Sosial dalam penyaluran bantuan sosial sangatlah diperlukan, sebagai penyongsong pelaku utama dalam hal penyaluran bantuan sosial, serta pelaku utama yang mewujudkan kesejahteraan. Oleh sebab itu Pemerintah harus fokus dalam distribusi bantuan sosial hingga sampai pada sasaran. Namun masih minimnya pelaku kerja sama yang dilakukan oleh Dinas Sosial kepada pihak ke tiga. Serta hambatan-hambatan lainnya yang peneliti temui dipenelitian kali ini menjadi masalah yang harus dibenahi oleh Pemerintah khususnya Dinas Sosial.

Belum optimalnya peran Dinas Sosial di Provinsi DKI Jakarta untuk mengurus semua urusan kesejahteraan yang ada di Provinsi DKI Jakarta, hal ini disebabkan oleh kurangnya SDM dari pihak Dinas Sosial itu sendiri. Selain itu penelitian ini berlangsung saat masa pandemi covid-19 yang menyebabkan turunnya angka -kesejahteraan- karna banyaknya PHK diperusahaan-perusahaan, berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas tentang bantuan sosial non-pandemi.

3.6 Diskusi Temuan Menarik Lainnya (Opsional)

Peneliti menemukan banyak faktor penghambat dalam pelaksanaan penelitian yang menjadi kesimpulan pada penelitian ini antara lain masalah teknis ataupun permasalahan yang datang dari kesadaran masyarakat yang kurang dalam mendukung suksesnya penyaluran bantuan sosial.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Peranan Dari hasil penelitian yang telah dikumpulkan berkaitan dengan Peran Dinas Sosial Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Sebagai Langkah Penanggulangan Kemiskinan di Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, peneliti mengambil sebuah kesimpulan adalah sebagai berikut :

1. Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta sejauh ini sudah menjalankan perannya dengan sangat baik dalam menyalurkan bantuan sosial khususnya Bantuan Sosial Tunai di Kota Jakarta Selatan. Dinas Sosial akan terus berlaku adil dalam proses penyaluran bantuan sosial mulai dari pendataan hingga terdistribusinya bantuan tersebut sampai kepada penerimanya. Hal ini dibuktikan respon positif dari masyarakat yang setidaknya merasa tersangga hidupnya sehingga tidak jatuh miskin hanya karena membeli biaya sehari-harinya.
2. Terdapat sedikitnya ada enam faktor yang menjadi penghambat peneliti sering temukan saat melakukan observasi dan wawancara. Hampir keseluruhannya adalah faktor eksternal, yang tetap masih bisa dibenahi, yaitu ketidak hadiran penerima BST dalam undangan pertama, data duplikasi dengan BPNT/PKH dari Kemensos, tidak ditemukan penerima bantuan, lokasi pendistribusian terlalu jauh dari alamat, kendala surat kuasa, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendistribusian yang masih sangat kurang.
3. Upaya yang dilakukan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta untuk mengatasi faktor penghambat diatas salah satunya adalah melakukan pemanggilan oleh Dinas Sosial melalui Bank DKI sampai tiga kali, pendataan yang bersifat periodik guna mengupdate data agar duplikasi data penerima dapat dihindari, melakukan pembenahan dengan Bank DKI melalui remapping terhadap lokasi domisili KPM, serta memperbaiki persyaratan dokumen tambahan untuk penerima bantuan yang jauh dari kepala keluarga, serta sarana prasarana tempat pendistribusian buku tabungan BST. Peneliti melihat bahwa peran yang dilakukan oleh Dinas Sosial sudah sangat sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya. Namun bantuan sosial tersebut masih belum bisa menjadi tolak ukur penanggulangan kemiskinan yang ada di Provinsi DKI Jakarta, tetapi sebagai penyangga agar masyarakat kembali pulih dan dapat kembali berdikari sendiri, setidaknya dari yang peneliti liat impact dari pemberian bantuan sosial ini menekan angka kemiskinan agar tidak terus melonjak naik.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki banyak keterbatasan namun yang paling menjadi keterbatasan utama adalah waktu penelitian yang sangat sempit. Penelitian ini dilakukan hanya kurang dari dua minggu hal lainnya menyangkut masalah pribadi peneliti terhadap masalah masalah yang ditemukan peneliti selama di jalan.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Peneliti menyadari bahwa pentingnya penyaluran bantuan sosial adalah hal yang kongkrit, maka sebab itu peneliti menyarankan agar penelitian tentang penyaluran sosial terkhusus bantuan sosial dimasa pandemi agar terus dikembangkan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan khususnya kepada Kepala Dinas Sosial beserta jajarannya di Provinsi DKI Jakarta, serta kaka senior purna praja yang telah memberikan wadah peneliti yang seluas-luasnya untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU DAN JURNAL

- Creswell, John W. 1994. *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*. California: SAGE Publications
- J. L. Dkk, Gibson. 1997. *Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Erlangga
- Jones, Charles O. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- J. Dwi Narwoko & Bagong Suyanto. 2010. *Sosiologi : Teks Pengantar dan terapan*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Nugroho, Listiyo. *LKS Sosiologi SMA*. Tangerang : Pustaka Firdaus
- Patilima, Hamid. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta
- Rahayu, Sri Lestari. 2012. *Buku Bantuan Sosial di Indonesia Sekarang dan ke Depan*, Jakarta : Fokumedia
- Riyadi dan Bratakusumah. 2005. *Peran Masyarakat dalam Pembangunan*, Jakarta: Multigrafika
- Siagian, S.P . 1978. *Teori Motivasi dan Aplikasinya*. Jakarta: Bina Aksara
- Siagian, Sondang P. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Siagian, Sondang P. 2002. *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Simangunsong, Fernandes. 2017. *Metodologi Penelitian Pemerintahan*, Bandung : Alfabeta
- Singarimbun, Masri. 2015. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta : LP3ES
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Teori Sosiologi: Tentang Pribadi dalam Masyarakat*, Bandung: PT Raja Grafindo
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta
- Suhardono, Edy. 1994. *Teori Peran*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Sulaeman, Munandar. 2006. *Ilmu Sosial Dasar*. Bandung: Refika Aditama
- Suparlan, Parsudi. 1995. *Kemiskinan di Perkotaan*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Usufuri, dkk. 2004. *Masalah-masalah Sosial dalam Pembangunan*. Bandung hal.79

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sosial.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019.

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial.

Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan.

HASIL PENELITIAN SEBELUMNYA

Ariska Suriyanti. 2011. *Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Fakir Miskin di Kota Makassar*

Muhammad Lukmanul Hakim. 2018. *Peran Dinas Sosial dalam Penyaluran Bantuan Sosial Terhadap*

Korban Bencana Kebakaran di Kota Samarinda Tahun 2018

SUMBER LAINNYA

<https://corona.jakarta.go.id/id/informasi-bantuan-sosial>

<https://smeru.or.id/id/content/urgensi-untuk-memperbaiki-sistem-bantuan-sosial-di-tengah-pandemi-covid-19>

<https://ppid.jakarta.go.id/daftar-pejabat-struktural>

<https://soppengkab.go.id/penjelasan-uu-nomor-23-tahun-2014-tentang-pemerintahan-daerah/>

<https://yuridis.id/work-from-home-apa-dasar-hukum-yang-menjadi-pelaksanaannya>

<https://jakarta.bps.go.id/indicator/27/605/1/jumlah-sarana-ibadah-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-dki-jakarta.html>

<https://dinsos.jakarta.go.id/struktur/dinas>